

KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PPID BAPENDA PEMPROV JABAR

Studi Kasus Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Bagian PPID

¹Wenda Ifani Hamidah²NinisAgustini Damayani ³Agus Rusmana
Program Magister Ilmu Komunikasi Unpad

¹wenda.ifanah@gmail.com²ninis.agustini@unpad.ac.id³a.rusmana@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengemukakan tentang bagaimana sebuah kebijakan informasi publik di bagian pelayanan PPID dapat menjadi pusat kegiatan dan dorongan dalam komunikasi dengan menerapkan uu keterbukaan informasi publik .Ditemukan sebuah fakta kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai KebijakanInformasipublik pada pelayanan PPID BapendaPemprovJabarsebagai proses sosialisasidalamberkomunikasidengandibantuoleh media cetak dan elektronikmelalui internet.penelitian ini menggunakan studi kasus .Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi kepustakaan

PENDAHUUAN

Sistem Pemerintahan Indonesia menjadi informasi terbuka dalam mengeluarkan pendapat. Pelayanan Informasi Bapenda Pemprov Jabar terpusat pada KID dan PPID dalam informasi internal untuk melaksanakan sesuai UU KIP. Pelaksanaan Pengolahan Informasi melalui media sosial dan website menjadi sarana untuk hubungan internal dan eksternal untuk pemenuhan informasi. Tahun 2011 dan 2012 menjadi kebijakan terbaik di lingkungan Pemerintah Jawa Barat

Pelayanan informasi oleh Bapenda Pemprov Jabar menerapkan sistem arus satu pintu. Institusi yang berwenang sepenuhnya sebagai gerbang utama pelayanan informasi adalah PPID. Keterbukaan informasi publik sebagai isu pemerintahan perihal pendapatan daerah. Media massa dalam penyebaran informasi, disamping mengeluarkan buletin, liflet, juga media internal pemerintah daerah, kegiatan komunikasi di masyarakat melalui media tradisional, dan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik. Dalam sistem menjalankan tugas dan fungsinya, baik Bagian PPID di Bapenda pemprov Jabar selaku lembaga yang menangani bidang informasi masih menemui beberapa kendala, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, prasarana, juga koordinasi antar lembaga.

Kendala tersebut tentu saja turut menghambat kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat. Berbagai gambaran yang dikemukakan diatas, seperti lambannya pelaksanaan UU KIP di badan publik daerah dengan ditandai lambannya pembentukan PPID, tidak adanya kasus sengketa informasi, juga kurang maksimalnya layanan informasi, kemudian mendorong perlu dilakukannya

Bapenda Pemprov Jabar merupakan penyelenggaraan publikasi samsat dalam pemerintahan yang berkomunikasi dengan Pemprov Jabar. Berkomunikasi dengan mengajak kerjasama dengan samsat dan pihak kepolisian. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang disediakan berwujud dokumen dan aset pemerintahan provinsi Jawa Barat tertinggal sampai terendah yang mengacu pada masalah SDM dan sengketa informasi. Keberadaan informasi yang sesuai peraturan provinsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan informasi publik dapat menjadi pusat kegiatan Bapenda Pemprov Jabar.

Dari uraian tersebut didapatkan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanaperan dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik.
2. Apadampak yang terjadidalampenerapan UU keterbukaaninformasi, dan ketigamengapakebijakaninformasipublikharus di terapkan pada pelayananbagian PPID BapendaPemprovJabar ?

KAJIAN TEORI

KebutuhanInformasipublik

dimasyarakatmenjadipintuawalpemerintahanterbukamenujupemerintahan yang baik(*good governance*). Hal ini seperti pendapat yang dinyatakan oleh Rodney A. Smollar (1992: 12), berikut : *"A society that wishes to adopt openness as a value of overarching significance will not merely allow citizen a wide range of individual expressive freedom, but will go on step further and actually open up the deliberate processes of government itself to the sunlight of public kota scrutiny. Ina truly open culture, the normal rule is that government does not conductthe business of the people behind closed door. Legislative, administrative, and judicial proceedings should as a matter of routine be open to the public.*

Berdasarkan data putusan KIP tahun 2016 di kota bandung.tahun 2011-2014, sebanyak 30 perkara yang berkaitan dengan sengketa informasi yang terdiri atas 18 ditolak 4 dikabulkan. "Sengketa paling banyak itu terjadi di Bandung,"

Kebijakan informasi publik dalam UU.No.14 Tahun 2008 sebagai upaya pemerintahan sebagai kinerja pemerintahan.Kepercayaan masyarakatdalam memperoleh informasi. Dalam rumusan berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan UU KIP harus berpegang pada prinsip/asas bahwa (a) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik., (b) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas., (c) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengancepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana., (d) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai denganUndang-Undangkepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelahdipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungikepentingan yang lebih besar daripada membukanya atausebaliknya.

Edward III dalam Agustino (2014: 149-154) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, struktur birokrasi untuk keberhasilan dalam faktor pendukung yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia (Staff)
- b. Anggaran (Budgetary): kebijakan dalam anggaran yang menjadi jaminan dalam keefektifan tujuan dan saran.
- c. Fasilitas (*facility*):sarana dan prasana untuk menunjang keberhasilan yang dilakukan dalam informasi dan faktor pendukung yang penting kebijakan
- d. Informasi dan kewenangan (*information and authority*): Faktor impelimentasi dalam wewenang dapat disesuaikan dalam jaminan dan kehendak dari kebijakan informasi.

Interaksisimbolikmerupakansimblo dalam cara membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Menurut Barba Ballis Lal, 2013 meringkaskan dasar pemikiran gerakan yaitu :

1. Manusia mempunyai keputusan bertindak dengan pemahaman subjektif
2. Kehidupan sosial sebagai proses interaksi
3. Memahami pengalamn melalui makna dari symbol
4. Dunia terbentuk dari objek social, tindakan manusia dalam penafsirann situasiobjek yang signifikan dan layaknya objek sosial

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendakatan studi kasus. Teknik pengumpulan yang digunakan adalahobservasi lapangan dan wawancara mendalam ke beberapa pegawai bagian PPID Di BapendaPemprov Jabar. Studi kasus menjadi metode yang digunakan peneliti pengumpulan data secara individu maupun kelompok.dan organisasi. Subjek yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara survey dan data untuk menguraikan suatu kasus secara rinci.

Teknik pemilihan informasi dengan menggunakan teknik sampling purposive . teknik mencakup orang yang masuk dasar kriteria .kriteria yang mendukung riset pegawai bagaian PPID yang sudah bekerja sudah lama mengetahui lingkungan internal dan eksternal. Dalam kriyantono 2012: 18.Riset Purposive digunakan untuk riset yang mengutamakan kedalaman data daripada untuk tujuan reperesentatif yang dapat digeneralisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 4.1 Informan

Nama	Tanggal Lahir	Jabatan
Muhammad Ridwan	6 desember'62	PPID
Herman	1 februari '66	Sekretaris
Sri Murtaningsih	12 November '61	Bidang Pengelolaan Informasi
Iswinarto Setiaji	13 April'61	Bidang Pelayanan Informasi
Andianto	28 Desember '63	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pelayanan Dokumentasi Internal

Penyediaan Layanan Informasi sebagai pengamann informasi eksternal dan internal sebagai akses utama. Penetapan Informasi untuk penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Informasi yang wajib untuk seluruh unit organisasi dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang Bapenda Pemprov Jabar. Pelaksanaan yang menyediakan sasmsat secara offline maupun online dalam tugas perlindungan informasi public yang berlaku dan disesuaikan pada pemerintahan.

Kinerja yang mengutamakan seluruh organisasi untuk memmpunyai agenda kerja pimpinan dan pejabat maupun informasi statistic dan keuangan . Perihal dokumen surat pengajuan terkait barang dan jasa pendapatan

Dampak Yang terjadi Dalam Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Ketersediaan Pemerintah mengelola dan menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai dengan transparasi aturan yang berjalan yang dikuatkan pemerintah. Dampak positif masyarakat untuk meningkat aspirasi dan partisipasi. Pelayanan sebagai jembatan utama dalam pemerintahan khususnya Bapenda Pemprov Jabar .

Informasi pengadaan barang dan jasa dalam pendapatan daerah menjadi patokan untuk akses laporan terkait pelayanan informasi publik. Akses terbuka untuk umum untuk kebutuhan masyarakat mengetahui pendapatan daerah dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Kebijakan Informasi Publik di Terapkan Pada Pelayanan Bagian PPID Bapenda Pemprov Jabar

PPID mempunyai sekretaris termasuk pada pejabat stuktural. Tugas sebagai humas yang melalukan permohonan dan pelayanan informasi masyarakat. Kebutuhan informasi public dalam bentuk cetak dan digital. Analisa pemakaian informasi public dikalangan

masyarakat Jawa Barat sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan publik sebagai kemampuan pengetahuanpendapatandaerayang masuk pada tahap pelayanan yang dibutuhkan dinilai lebih mudah dalam pemahaman dan orientasi.

Paramater untuk memilihinformasi publik yang efektif dapat dipraktikkan dengan penyampaian informasi dan keterangan stuktur informasi yang baik dengan aplikasi yang masuk dalam pola pencarian informasi menggunakan aturan dalam UU. No.14 Tahun 2008 pola pencarian informasi komunikatif dan adaptif dalam keadaan teknologi.

Sebuah institusi di lingkungan pemerintahan provinsi jawabarot mempunyai Komisi Informasi Daerah (KID) provinsi juga belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan bagi pemerintah provinsi Jawa Barat yakni berupa kebijakan umum, petunjuk teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana yang diamanatkan UU KIP. Menurut Bapak Muhammad Ridwan selaku pimpinan PPID penerapan pelayanan informasi public berpegang pada komisi informasi di daerah.

Bahan informasi publik di dunia pemerintahan Provinsi Jawa Barat terpusat untuk permohonan informasi langsung ke gedung sate dengan menghubungi humas. Informasi di lingkungan bapenda pemerintahan jawabarot untuk penyebaran informasi dalam kelembagaan. Secara digital yang diperuntukkan untuk kalangan pegawai Bapenda Pemprov Jabar untuk membangun inspirasi inovasi teknologi.

Senada dengan Herman mengatakan pengelolaan sumber informasi dalam keterbatasan ke lembaga dapat diakases melalui media kapan saja dengan berlandaskan informasi sesuai dengan kewenanangan

Selain itu Sri Murtaningsih juga menjelaskan untuk mencapai tetap memberikan informasi dapat dilihat pada ketentuan UU KIP. Hasil penelitian ini yaitu mengakibatkan penggunaan informasi menjadi berubah dalam hal pencarian informasi dengan bantuan teknologi. Hasil proses implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi public sebagai bentuk dasar saat ini dapat digunakan sebagai proses sosialisasi dalam berkomunikasi dengan dibantu oleh media cetak dan elektronik melalui internet.

Dukungan pembagian pengelolaan informasi public dalam masalah permohonan yang dibentuk oleh pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pembentukan potensi seperti bagian humas yang menaati peraturan secara teknis pelaksanaan memegang pedoman UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat tingkat

koordinasi di lapangan untuk proses pelayanan informasi masih terhambat informasi public masih dibenahi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peran dan fungsi PPID Bapenda Pemprov Jabar dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pembantu pejabat struktural untuk memenuhi hak setiap orang dalam mengakses pemenuhan kebutuhan Informasi Publik
2. Dampak di lingkungan Bapenda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan UU KIP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kepercayaan dan kearutan informasi publik.
3. Kebijakan Informasi publik pada pelayanan PPID Bapenda Pemprov Jabar sebagai proses sosialisasi dalam berkomunikasi dengan dibantu oleh media cetak dan elektronik melalui internet.

Saran

1. Peran dan fungsi PPID Bapenda Pemprov Jabar dapat juga untuk mengakses secara luar dalam lingkup eksternal yang lebih dikaji dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 dalam hal kebutuhan.
2. Dampak di lingkungan Bapenda Pemprov Jabar untuk lebih meningkatkan kepercayaan dengan tidak menyebarkan informasi tidak benar dalam dunia pemerintahan dan lebih mensortir informasi yang masuk.
3. Kebijakan informasi publik pada pelayanan PPID Bapenda Pemprov Jabar untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dengan internal dan dapat diseimbangkan dengan media cetak dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Foss ,Karen. 2014. *Teori Komunikasi*. Jakarta :Salemba
- Kriyantono, Rachmat.2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho,Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan Jakarta*: PT. Elex Media Komputindo.
- Van Meter dan Van Horn . 2014 :*Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sumber :lain :

<https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/kasus-sengketa-informasi-paling-banyak-terjadi-di-bandung-1608290.html> diakses pada hari Selasa tanggal 03 juli 2018 pukul 18.23 WIB